

**SKRIPSI**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN  
DAERAH DI KABUPATEN BADUNG**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : TRYANA RISA SAMMATHA KICHEN  
NIM : 2015654003**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2024**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN  
DAERAH DI KABUPATEN BADUNG**

**Tryana Risa Sammatha Kichen  
2015654003**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRAK**

Permasalahan ekonomi di Bali khususnya Kabupaten Badung mendorong pemerintah untuk memulihkan perekonomian melalui kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bagaimana efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dibantu dengan analisis rasio efektivitas yaitu perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor menggunakan rumusan Indeks Kinerja Pajak (*Tax Performance Index*) dan menggunakan analisis dengan model efektivitas melalui beberapa indikator yaitu Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan atau Kesamaan, Responsivitas, dan Ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor terdapat beberapa hambatan dihadapi baik oleh pemerintah maupun wajib pajak. Selain itu berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor jika dilihat dari Tingkat rasio penerimaan pajak tahun 2023 menunjukkan bahwa cukup efektif. Sementara efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor jika dilihat dari analisis model efektivitas dengan indikator 1) Efisiensi menunjukkan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung cukup efektif, 2) Kecukupan, pemutihan pajak mampu memenuhi kebutuhan wajib pajak, 3) pemerataan/kesamaan, pemutihan pajak kendaraan telah diterima secara merata oleh wajib pajak, 4) responsivitas, pemutihan pajak kendaraan bermotor mendapat respon positif dari masyarakat, dan 5) ketepatan, menunjukkan pemutihan pajak kendaraan bermotor belum tepat sasaran.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Indeks Kinerja Pajak*

***ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF MOTOR VEHICLE TAX  
INCENTIVE IN AN EFFORT TO INCREASE REGIONAL REVENUE  
IN BADUNG REGENCY***

**Tryana Risa Sammatha Kichen  
2015654003**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRACT**

*Economic problems in Bali, especially Badung Regency, encourage the government to restore the economy through the policy of whitening motor vehicle taxes. This study analyzes the implementation of motor vehicle tax whitening and how effective motor vehicle tax whitening is in increasing motor vehicle tax revenue in Badung Regency. This study uses a qualitative research method assisted by an effectiveness ratio analysis, namely a comparison of targets and the realization of motor vehicle tax revenues using the Tax Performance Index formulation and using an analysis with an effectiveness model through several indicators, namely Efficiency, Adequacy, Equity or Similarity, Responsiveness, and Accuracy. Based on the results of research that has been carried out, in the implementation of motor vehicle tax whitening, there are several obstacles faced by both the government and taxpayers. In addition, based on the results of the analysis carried out, it shows the effectiveness of motor vehicle tax whitening when viewed from the tax revenue ratio rate in 2023, showing that it is quite effective. Meanwhile, the effectiveness of motor vehicle tax whitening when viewed from the analysis of the efficiency model with indicators 1) Efficiency shows that the whitening of motor vehicle tax in Badung Regency is quite effective, 2) Adequacy, tax whitening is able to meet the needs of taxpayers, 3) Evenness/equality, vehicle tax whitening has been received equally by taxpayers, 4) Responsiveness, whitening of motor vehicle taxes has received a positive response from the community, and 5) accuracy, showing that the whitening of motor vehicle taxes is not on target*

***Keywords: Effectiveness, Incentive of Motor Vehicle Tax, Tax Performance Index***

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN  
DAERAH DI KABUPATEN BADUNG**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi Pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi  
Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : TRYANA RISA SAMMATHA KICHEN  
NIM : 2015654003**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2024**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Tryana Risa Sammatha Kichen

NIM : 2015654003

Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Analisis Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor  
dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah di  
Kabupaten Badung

Pembimbing : Ni Ketut Sukasih, SE., MM  
Drs. I Made Sarjana., M. Agb

Tanggal Uji : 16 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri atau orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah dijadikan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 16 Agustus 2024



Tryana Risa Sammatha Kichen

v

**SKRIPSI**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN  
DAERAH DI KABUPATEN BADUNG**

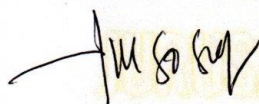
**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : TRYANA RISA SAMMATHA KICHEN**  
**NIM : 2015654003**

**Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik Oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**Ni Ketut Sukasih, SE., MM**  
**NIP. 196602261993032001**

**Drs. I Made Sanjana., M.Agb**  
**NIP. 195912311989101001**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**KETUA**



**I Made Baginda, SE., M.Si, Ak**  
**NIP. 197512312005011003**

**SKRIPSI**

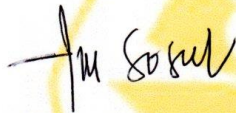
**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN  
DAERAH DI KABUPATEN BADUNG**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian pada:**

**Tanggal 16 bln Agustus thn 2024**

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA:**




**Ni Ketut Sukasih,SE.,MM  
NIP. 196602261993032001**

**ANGGOTA:**



**2. Ni Luh Putri Setyastrini, S.E., M.Ak.  
NIP. 199506212022032017**



**3. Dr.Drs.Paulus Subiyanto,M.Hum  
NIP. 196106221993031001**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan pada Politeknik Negeri Bali. Atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, disampaikan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.Com selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri yang telah memberikan pengarahan serta petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., Ak., M.M. CA., CPMA., CAAT., CADE., BKP., Asean CPA., CPA. selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan yang telah memberikan pengarahan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Ni Ketut Sukasih, SE., MM selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.



5. Drs. I Made Sarjana., M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Orang tua, keluarga, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
7. Mahasiswa dengan NIM 2015654039 yang senantiasa menemani suka dan duka serta memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
8. Ni Kadek Diah Lesmana Dewi selaku alumni dan *team leader* penulis yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan pengertian serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Adya Febriana, Dian Aprillia, dan Sagung Tirtha yang memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Diri sendiri yang selalu berusaha dan bertahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini. diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan pendidikan selanjutnya.

Badung, 31 Juli 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	i
<b>Abstrak</b> .....	ii
<b>Abstract</b> .....	iii
<b>Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan</b> .....	iv
<b>Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah</b> .....	v
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	vi
<b>Halaman Penetapan Kelulusan</b> .....	vii
<b>Kata Pengantar</b> .....	viii
<b>Daftar Isi</b> .....	x
<b>Daftar Gambar</b> .....	xii
<b>Daftar Tabel</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Kajian Teori .....	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	17
C. Alur Pikir.....	19
D. Pertanyaan Penelitian .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	23
A. Jenis Penelitian .....	23
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	24
C. Sumber Data .....	25
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	27
E. Keabsahan Data.....	28
F. Analisis Data.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	35
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	35
B. Pembahasan dan Temuan.....	39
C. Keterbatasan Penelitian.....	49
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	50
A. Simpulan.....	50
B. Implikasi .....	51
C. Saran .....	52

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	54
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	58



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir.....	21
Gambar 3. 1 Analisis Data .....	34



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Perhitungan Rasio Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor.

Lampiran 2: Manuskrip Wawancara dengan Informan

Lampiran 3: Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Bali Tahun 2019-2023

Lampiran 4: Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota Provinsi Bali Tahun 2019-2023

Lampiran 5: Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan atas Dasar Harga Konstan Periode 2019-2023

Lampiran 6: Surat Izin Penelitian

Lampiran 7: Dokumentasi Wawancara dengan PLT SAMSAT Kabupaten Badung



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan atas Dasar Harga Konstan Periode 2019-2022.....	2
Tabel 1.2 Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Bali (2019-2022).....	3
Tabel 1.3 Data Target, Penerimaan, Tunggakan dan Denda PKB Kabupaten Badung (2019-2023) .....	5
Tabel 3.1 Kriteria Efektivitas .....	33



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang Masalah

Tinggi rendahnya pendapatan suatu negara dapat mempengaruhi pembangunan nasional jangka panjang, dalam hal ini perekonomian menjadi sektor utama pembangunan ekonomi (Dwina, 2020). Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perluasan kegiatan ekonomi selama periode waktu tertentu dengan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah metode untuk mengukur pembangunan ekonomi; yaitu jumlah semua nilai tambah yang dihasilkan oleh semua bisnis di wilayah tersebut selama periode waktu tertentu. Dua unit harga yang berbeda digunakan untuk membuat PDRB satu berdasarkan harga berlaku dan yang lainnya berdasarkan harga konstan (Rori *et al.*, 2016). Salah satu cara untuk memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah dengan melihat nilai PDRB aktualnya, yang dihitung dengan menggunakan metode harga konstan. Metode ini menggunakan unit harga dasar yang ditetapkan. Berikut ini adalah rincian pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2019 hingga 2022, dibedakan berdasarkan provinsi dan dinyatakan sebagai tingkat PDRB dengan harga konstan.

**Tabel 1. 1**  
**Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan atas**  
**Dasar Harga Konstan Periode 2019-2022**  
**(dalam miliar rupiah)**

<b>Provinsi</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Sumatera	2.330.515	2.302.556	2.375.755	2.487.257
Jawa	6.529.718	6.365.139	6.598.252	6.948.624
Bali	162.693	147.499	143.865	150.821
NTB	93.872	93.829	95.438	102.074
NTT	69.389	68.810	70.541	72.695
Kalimantan	918.817	897.681	926.718	972.496
Sulawesi	702.778	704.379	744.320	796.819
Maluku, Papua	254.287	258.189	284.406	308.993

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023

Sektor pariwisata yang merupakan komponen utama dalam perekonomian di Bali namun kondisi ekonomi di Bali yang menurun terlihat pada tabel 1.1. Terlihat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan di beberapa provinsi khususnya Provinsi Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami penurunan PDRB cukup signifikan. Tahun 2019 PDRB Provinsi Bali sebesar Rp162.693 mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp147.499. Tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi Rp143.865. Memasuki tahun 2022 kondisi perekonomian di Bali menunjukkan adanya perbaikan yang terlihat dari peningkatan PDRB menjadi sebesar Rp150.821.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berkaitan dengan pendapatan dan anggaran suatu daerah. Pajak sebagai salah satu unsur penting untuk menyokong perekonomian Indonesia menjadi konsentrasi pemerintah karena penerimaan pajak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara (Yurianto dan Tantowi, 2021). Penerimaan pajak merupakan salah



satu komponen paling berkontribusi dalam kebijakan fiskal yang stabil untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka menyejahterakan masyarakat (Mu'awanah dan Panjawa, 2022).

**Tabel 1.2**  
**Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota**  
**Provinsi Bali (2019-2022)**

<b>Kab/ Kota</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Jembrana	Rp 133.698.784	Rp 148.045.103	Rp 185.004.035	Rp 175.992.613
Tabanan	Rp 354.558.239	Rp 313.042.530	Rp 362.314.631	Rp 436.408.393
Badung	Rp 4.835.188.460	Rp 2.116.974.302	Rp 1.750.345.226	Rp 3.705.745.447
Gianyar	Rp 997.478.368	Rp 545.869.873	Rp 430.172.109	Rp 857.553.633
Klungkung	Rp 225.063.772	Rp 220.893.875	Rp 254.494.496	Rp 309.462.458
Bangli	Rp 127.040.436	Rp 104.325.150	Rp 163.537.096	Rp 144.005.843
Karangasem	Rp 233.013.033	Rp 219.176.733	Rp 252.688.747	Rp 301.332.231
Buleleng	Rp 365.595.301	Rp 318.986.891	Rp 391.988.445	Rp 410.564.892
Denpasar	Rp 1.010.779.481	Rp 731.261.281	Rp 792.362.414	Rp 888.051856

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2023

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pendapatan asli suatu daerah atau wilayah tertentu. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Bali dimulai dengan meningkatkan pendapatan asli daerah masing-masing kabupaten. Tabel 1.2 menunjukkan Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali dengan PAD tertinggi dibandingkan kabupaten atau kota lainnya sebelum adanya pandemi hingga pasca pandemi. Meskipun demikian, PAD Kabupaten Badung juga mengalami penurunan yang signifikan dilihat pada tahun 2019 PAD Kabupaten Badung sebesar Rp4.835.188.460 pada tahun 2020 sebesar Rp2.116.974.302 dan tahun 2021 sebesar Rp1.750.345.226. Penurunan PAD ini mendorong pemerintah untuk memulihkan kembali perekonomian salah satunya dengan pemberian insentif berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Pemutihan pajak kendaraan bermotor yaitu penghapusan sanksi keterlambatan atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat mendongkrak pendapatan daerah di Kabupaten Badung. Melalui skema pemutihan pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak akan dikenai denda keterlambatan, cukup membayar pokok dan pajak kendaraan bermotor (PKB). Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali No. 24 Tahun 2023, kebijakan penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Bali namun tetap memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat. (Darmakanti dan Febriyanti, 2021). Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, target dan penerimaan pajak kendaraan bermotor Provinsi Bali mengalami fluktuasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pergerakan yang tidak stabil atau bersifat fluktuatif ini menunjukkan pajak kendaraan bermotor tidak diterima secara maksimal karena masih terdapat tunggakan dan denda atas pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 1. 3**  
**Data Target, Penerimaan, Tunggakan dan Denda PKB**  
**Kabupaten Badung (2019-2023)**  
**(dalam miliar rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Tunggakan</b>	<b>Denda</b>
2019	335.688.323.470	370.921.919.678	60.940.849.000	13.277.210.775
2020	276.397.117.818	329.491.466.850	57.265.213.100	5.946.532.250
2021	286.091.000.000	331.885.033.900	75.939.969.000	8.643.612.650
2022	352.901.375.877	409.643.704.300	47.916.788.200	415.105.514.300
2023	362.987.588.861	289.038.054.000	39.149.138.400	1.784.389.800

Sumber: SAMSAT Kabupaten Badung, 2024

Tabel 1.3 menunjukkan adanya penurunan tunggakan kendaraan bermotor pada tahun 2023, namun penurunan tunggakan tersebut tidak sejalan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2023, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor tidak memenuhi harapan dan lebih rendah dari yang diharapkan dari tahun 2019 hingga 2022. Keringanan sanksi administratif berupa bunga dan denda yang diberikan, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat akan justru terus menunda pembayaran pajak kendaraannya. Hal ini karena sanksi dan bunga akan dihapuskan meskipun telah menunggak selama beberapa periode. Permasalahan ini dapat terjadi karena beberapa pengaruh seperti ekonomi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya kesadaran wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, serta faktor eksternal dan faktor internal lainnya. Penulis ingin meneliti apakah kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang ditetapkan dan dilaksanakan di Kabupaten Badung telah efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung.

Program pemutihan pajak kendaraan yang berdampak pada pengumpulan pajak di berbagai daerah di Indonesia telah menjadi objek beberapa penelitian. Sebagai contoh studi yang dilakukan Patria (2023) di Kabupaten Tegal mengukur efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan melalui Teknik analisis data Miles dan Huberman, memperoleh hasil kebijakan tersebut cukup efektif meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Selain itu Okrianza (2022) dengan penelitiannya di Kepulauan Riau menggunakan rumusan *Tax Performance Index (TPI)* dengan menekankan pada rasio target dan realisasi penerimaan pajak, menunjukkan bahwa pemutihan pajak sangat efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian Austin *et al.* (2023) di Provinsi Sumatera Selatan, yang mengukur efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan indikator pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi menunjukkan program pemutihan PKB terlaksana dengan baik selama 3 bulan dan dapat dikatakan tepat sasaran. Permasalahan yang timbul setelah adanya pemutihan pajak pada penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa realisasi PAD dari kebijakan ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan merupakan dampak dari sejumlah faktor yang saling berhubungan (Gaol, 2023).

**b. Rumusan Masalah**

Menjelaskan lebih detail mengenai pemaparan latar belakang terkait kondisi perekonomian di Bali, kebijakan pemutihan pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang dapat

meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan daerah, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung tahun 2023?
2. Bagaimana efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung tahun 2023?

c. **Batasan Masalah**

Penulis menetapkan ruang lingkup penelitian dengan merumuskan masalah, yang memungkinkannya mengonfirmasi subjek dan objek penelitian, mempersempit fokusnya, dan melakukan penelitian dan pembahasan yang lebih efektif, yang mengarah pada temuan-temuan yang sejalan dengan tujuan utama penelitian. Penulis mengarahkan penelitian pada hal yang memengaruhi keberhasilan kebijakan pemutihan pajak, permasalahan yang dihadapi saat dilaksanakannya kebijakan ini. Dalam melakukan analisis efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan yaitu menggunakan perhitungan rasio efektivitas kebijakan menggunakan rumusan Indeks Kinerja Pajak (*Tax Performance Index*) dan model-model yang digunakan sebagai alat untuk melihat efektivitas kebijakan yaitu Efisiensi (*Efficiency*), Kecukupan (*Aducuacy*), Perataan/ Kesamaan (*Equity*), Responsivitas (*Responsiveness*), dan Ketepatan (*Appropiateness*). Penulis terfokus pada pelaksanaan kebijakan tahun 2023 dan penetapan target serta realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Badung tahun 2023.

#### d. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada perumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, sehingga tujuan penelitian ini disebutkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung tahun 2023.
- b. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan daerah Kabupaten Badung tahun 2023.

##### 2. Menindaklanjuti tujuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

###### a. Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dan menentukan arah kebijakan baru melalui pengetahuan terkait faktor-faktor keberhasilan maupun kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan otoritas pajak dapat menemukan solusi atau pencegahan atas hambatan yang terjadi selama periode kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

###### b. Bagi Wajib Pajak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang rincian skema pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh otoritas pajak. Temuan penelitian ini

diharapkan dapat membantu para wajib pajak memahami tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak dan pemilik kendaraan bermotor. Kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan tersebut agar dipahami bahwa akan digunakan kembali untuk menyejahterakan wajib pajak itu sendiri.

c. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan pendidikan dan penyempurnaan kurikulum bagi program studi sarjana terapan akuntansi perpajakan. Peneliti mahasiswa yang tertarik pada program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini mungkin menggunakan temuan studi ini sebagai titik awal untuk penelitian selanjutnya. Melalui pengembangan pendidikan dan penyempurnaan kurikulum agar dapat meningkatkan kualitas mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya dalam bidang perpajakan.

d. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini agar menjadi pedoman bagi mahasiswa agar menjadi bibit wajib pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui penelitian ini, mahasiswa sebagai generasi muda agar lebih peka terhadap fenomena-fenomena terkait perpajakan yang terjadi di Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait pelaksanaan dan efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan di Kabupaten Badung, dapat disimpulkan yaitu:

1. Pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor di kabupaten tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2023, mulai tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023. Selama pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi baik pemerintah maupun wajib pajak. Hambatan yang dihadapi pemerintah meliputi kurangnya partisipasi masyarakat akibat dari kurangnya sosialisasi, kurangnya sumber daya baik tenaga kerja maupun dana, dan sistem teknologi informasi yang tidak memadai. Sementara hambatan yang dihadapi wajib pajak meliputi kondisi ekonomi wajib pajak yang kurang baik menyebabkan wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan pemutihan pajak kendaraan bermotor.
2. Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung serta analisis melalui model efektivitas menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor



tahun 2023 dinilai cukup efektif meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terdapat beberapa implikasi dalam penelitian ini yang bisa dimanfaatkan, meliputi:

### **1. Implikasi Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor mengenai hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan pemutihan. Penelitian ini memberikan pemahaman bagaimana menganalisis efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung dengan analisis rasio penerimaan pajak kendaraan bermotor dan menggunakan analisis dengan model teori efektivitas.

### **2. Implikasi Praktis**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah untuk menciptakan strategi baru sebagai upaya menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi selama pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor agar pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung memberikan hasil yang optimal. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi evaluasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung agar pelaksanaan pemutihan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

### C. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dirangkum dalam Kesimpulan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

#### 1. Bagi UPTD SAMSAT Kabupaten Badung

Pihak UPTD SAMSAT Kabupaten Badung agar berupaya meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan meningkatkan sosialisasi terkait pemutihan, melakukan penyederhanaan prosedur administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta melakukan pembaruan sistem teknologi agar pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung dapat lebih efisien. Selain itu pihak UPTD SAMSAT Kabupaten Badung diharapkan menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk menciptakan strategi baru dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

#### 2. Bagi wajib pajak

Masyarakat sebagai wajib pajak pemilik kendaraan bermotor agar lebih memperhatikan peraturan dan insentif terkait pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat memperoleh kesempatan memanfaatkan insentif yang disediakan pemerintah. Wajib pajak agar lebih sadar terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak pemilik kendaraan bermotor.

### 3. Bagi mahasiswa

Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor selanjutnya agar memperhatikan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan penelitian saat melakukan wawancara agar mudah dimengerti sehingga informan dapat memberikan informasi yang lebih detail.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2020). Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23.
- Ajzen. Icek. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Alhamid, T. (2019). *Instrumen Pengumpulan Data*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/e56xs>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari, Ed.). CV Jejak.
- Ardiansyah, A., Risnita Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
- Austin, T., Alriadho, A., Tholib, I., & Febrianza, M. (2023). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021. *Mimbar Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 12(1), 83–91.
- Cresswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design* (L. Habib, K. Koscielak, B. Bauhaus, & M. Masson, Eds.; 3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Darmakanti, N. M., & Febriyanti, N. K. E. S. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servada*, 2, 88–94.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (V. Knight, L. Habib, K. Koscielak, & J. Tacsh, Eds.; 4th ed.). SAGE Publication, Inc. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=AIRpMHgBYqIC&oi=fnd&pg=PP1&dq=denzin+and+lincoln+&ots=kqBMylfyj8&sig=y5R8GnCD1K1JjKLWQM9L78GFxgg>
- Dwina, I. (2020). *Melemahnya Ekonomi Indonesia Pada Sektor Pariwisata, Akibat Dampak Dari Pandemi Covid-19*. <https://osf.io/8e27t/download>
- Effendi, A., Fatimah, A. T., & Amam, A. (2021). Analisis Keefektifan Pembelajaran Matematika Online Di Masa Pandemi Covid-19. *Teorema: Teori Dan Riset Matematika*, 6(2), 250–259.

- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 18, 68–88.
- Fransiska, Y., & Vivian, A. (2022). Apa Itu Pemutihan Pajak? *Pajakku*.
- Gaol, D. J. S. L. (2023). Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Medan Selatan. *Journal of Science and Social Research*, VI, 41–50.
- Indrasari, Y. (2020). Efisiensi Saluran Distribusi Pemasaran Kopi Rakyat Di Desa Gending Waluh Kecamatansempol (Ijen) Bondowoso. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 14(1), 44–50.
- Junaidy, J., Sugiannor, S., Anhar, D., Hamdie, A. N., & Saddiq, S. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kapuas. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 40–49. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/as.v6i2.5506>
- Mafaza, W., Mayoan, Y., & Sasetiadi, T. H. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pacitan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 1–4. <https://core.ac.uk/reader/296878730>
- Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang. *Public Administration Journal*, 1(1), 34–48.
- Mazda, C. N., & Fikria, A. N. (2021). Analisis Efektifitas Google Classroom, Zoom Meeting Dan Google Meet Sebagai Multimedia Interaktif Pembelajaran Online. *Journal of Informatics, Information System, Software Engineering and Applications*, 1(1). <https://doi.org/10.20895/INISTA.V3I2>
- Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197. <https://dirdosen.budiluhur.ac.id/0303057504/jurnalbinabangsa.pdf>
- Mu'awanah, S., & Panjawa, L. J. (2022). Redistribusi Pajak Mendukung Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 19(1), 46–55.

- Okrianza, E. (2022). *Tinjauan Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kepulauan Riau* [Politeknik Keuangan Negara Stan Tangerang Selatan]. <http://eprints.pknstan.ac.id/1231/>
- Patria, Y. M. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Program Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Di Samsat Kabupaten Tegal. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 273–280.
- Pebratama, R., Adnan, M. F., & Mubarak, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Santunan Kematian Berdasarkan Perwako Padang Nomor 12 Tahun 2015. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 156–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2>
- Pramita, S. W., Subekti, I., & Rosidi. (2018). Studi Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 4, 122–127.
- Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y. (2017). Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil). *Jurnal Simetris*, 8(2), 679–686.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA. , Akt. , QIA. , CFrA. , C. (2019). *Perpajakan* (D. Arum, Ed.; 2019th ed.). ANDI.
- Purwoko, K., Prasetyo, D., WIjayanti, L. E., & Setiawan, W. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(3), 15–28. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.485>
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, 2, 71–78.
- Putri, D. E. (2021). *Pengaruh implementasi kebijakan pajak parkir terhadap efektivitas penerimaan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2018* [Thesis (Sarjana)]. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rioni, Y. S., & Syauqi, T. R. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan Npwp Ukm Di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28–37.
- Rori, C. F., Luntungan, A. Y., Niode, A. O., Pembangunan, J. E., & Ekonomi, F. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 243–254.
- Sidik, M., & Soewondo. (1996). *Keuangan Daerah*.

- Siti Resmi. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus* (E. S. Suharsi & G. S. P. G, Eds.; 11th ed.). Salemba Empat.
- Surokim, S., & Rakhmawati, Y. (2016). *Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula* (S. Surokim, Ed.). Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi, FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur.
- Winarta, I. W. T., Raka Anak Agung Gede, & Sumada, I. M. (2020). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 28–42.
- Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2019). Peran *Theory of Planned Behavior* dan Niai Kearifan Lokal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 149–167.
- Yurianto, Y., & Tantowi, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dki Jakarta. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 7(4), 436–449.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI